

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas eksistensi *local gangster* di Bali. Dengan mengangkat judul “*Local Gangster* dalam Dinamika Politik Lokal: Kebangkitan Bangsawan Lokal Bali dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca-Otoritarian”, *local gangster* dilihat sebagai kelompok strategis yang memiliki kekuatan – baik sosial, politik, maupun ekonomi – serta akar lokalitas sebagai nilai tawar bagi para elite politik daerah untuk menggalang kekuatan. *Local gangster* sendiri memiliki dua sisi yang berbeda. Secara umum, *local gangster* lekat dengan stigma negatif dan praktek premanisme. Di sisi lain, nilai lokalitas yang diusung oleh *local gangster* menjadi peluang bagi elite politik di daerah untuk meningkatkan nilai tawar mereka di masyarakat. Hal ini juga lah yang menjadi peluang bangsawan lokal untuk menguatkan kembali posisinya dalam kepemimpinan daerah.

Korelasi antara *local gangster* dengan nilai lokalitas yang menjadi semangat di dalamnya merupakan hal yang terbilang baru. *Gangster*, yang dalam sejarahnya memiliki kekuatan yang terpusat, belum mengenal nilai lokalitas yang harus mereka jadikan sebagai landasan “perjuangan”. Hingga pada era desentralisasi ini, nilai lokalitas ternyata menjadi sesuatu yang penting untuk dipertontonkan dan tak dapat lepas dari identitas *local gangster*. Pengusungan nilai lokalitas yang terkesan ahistoris ini justru menjadi hal yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu – yang dalam hal ini merupakan pihak aristokrat atau bangsawan – untuk menjalankan agenda politiknya.

Bukan tanpa sebab, bangkitnya bangsawan dalam ranah politik lokal menandakan bahwa mereka sudah “bangun dari tidur panjangnya”. Fenomena kebangkitan ini dapat dilihat menggunakan perspektif historis, dimana nasionalisme yang selalu dimunculkan mulai awal abad 20-an membawa dampak marginalisasi serta ketidaksetaraan bagi masyarakat adat – termasuk kaum

bangsawan di dalamnya (Davidson dan Henley 2007: 5). Hal ini semakin diperparah ketika rezim Orde Baru berkuasa. Penerapan ideologi tunggal Pancasila dan narasi pluralisme yang selalu diusung menjadi tekanan tersendiri bagi kaum bangsawan yang pada akhirnya sulit untuk mendapatkan supremasi (Davidson dan Henley 2007). Runtuhnya rezim Orde Baru merupakan momentum bagi bangsawan adat untuk kembali mendapatkan supremasinya dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan *local gangster* sebagai sarana artikulasi kepentingan.

Local gangster – yang juga dikenal dengan nama lain organisasi milisi-sipil – merupakan bentuk pelembagaan preman-preman di tingkat lokal. Semula para preman ini hanya dilembagakan di tingkat pusat untuk menyukseskan rezim Orde Baru dari segi pendekatan ketertiban dan keamanan nasional. Kehadiran milisi-sipil ini digunakan sebagai sarana mewujudkan stabilitas politik dari narasi komunisme yang berkembang saat itu (Nugroho dan Wilson dalam Priyono dan Hamid 2014). Menurut Nugroho dan Wilson (2014), narasi komunisme yang berkembang di masyarakat ini berhasil meningkatkan rasa militansi dan militeristik masyarakat saat itu. Hal inilah yang akhirnya menjadikan milisi-sipil semakin marak dan menguat bahkan sampai ke tingkat lokal.

Lengsernya Orde Baru yang diiringi dengan desentralisasi menjadi penguat bagi pergeseran kekuatan milisi-sipil di tingkat pusat ke daerah. Pada era demokrasi pasca reformasi ini, *local gangster* tidak bisa selamanya larut dalam romantisme masa lalu – mengingat perannya di era Orde Baru sebagai elemen stabilitas politik (Hadiz 2010: 135). Dalam hal ini, *local gangster* mau tidak mau harus menawarkan hal baru agar dapat bertahan. Dengan menggunakan jubah organisasi masyarakat (ormas), *local gangster* melakukan perubahan agar kehadirannya menjadi lebih halus dan lebih diterima oleh masyarakat. Seiring dengan praktek demokrasi elektoral di tingkat lokal, *local gangster* bertransformasi menjadi bagian dari bahasa dan wacana dari masyarakat sipil (Nugroho dan Wilson dalam Priyono dan Hamid 2014) hingga masuk ke dalam sirkulasi elite.

Dalam konteks politik lokal pasca Orde Baru, peran *local gangster* mengalami pergeseran. Semula *local gangster* hanya berfokus pada urusan

penyedia jasa keamanan “swasta” di beberapa sektor seperti pusat hiburan, sektor pariwisata, dan jasa penyedia parkir (Ryter 2007). Namun, pada era desentralisasi ini, *local gangster* tak hanya dilihat sebagai “tukang pukul” saja. *Local gangster* memiliki kedekatan dengan elite politik lokal serta partai politik – baik di tingkat daerah maupun pusat. Hal ini diperkuat Ryter (2005) karena di era pasca Orde Baru opsi semakin terbuka bagi para anggota *local gangster* untuk masuk ke berbagai partai politik. Selain itu, *local gangster* juga menjalin kedekatan dengan para pelaku bisnis terutama di tingkat lokal (Hadiz 2010). Tak hanya digunakan untuk faktor keamanan, hal ini juga menunjukkan bahwa secara kapital *local gangster* setara dengan para pebisnis. Kembali lagi, ini merupakan bentuk perjuangan dari *local gangster* untuk mempertahankan eksistensi mereka. Namun yang perlu diingat bahwa pergeseran peran *local gangster* di era pasca Orde Baru merupakan suatu bentuk liberalisasi dari segala macam aktivitas berbau kriminal (King 2003).

Beberapa ilmuwan sosial-politik setidaknya memiliki penjelasan yang berbeda mengenai *local gangster*. Bahkan mereka menggunakan istilah yang berbeda pula untuk mendeskripsikan lebih lanjut mengenai *local gangster*. Hal ini tentu tak lepas dari latar belakang riset yang dilakukan. Hobsbawm (1981) mengawali pembahasan dengan menyajikan konsep *social bandits*. *Social bandits* diklasifikasikan sebagai pelanggar hukum dan pelaku kriminal (Hobsbawm 1981: 17). Lebih spesifik lagi, Hobsbawm menjelaskan bahwa mereka juga melakukan kegiatan yang bersifat premanisme – seperti pemalakan. Dalam konsepsinya, Hobsbawm menganalisa munculnya bandit merupakan sebuah bentuk refleksi dan sarana komunikasi sosial yang terjadi di masyarakat. Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa *social bandits* ini muncul, yaitu: (1) sebagai simbol dari kekacauan yang terjadi di masyarakat, (2) sebuah pertanda munculnya kelas baru dalam masyarakat, dan (3) sebuah bentuk resistensi dari kelompok tertentu terhadap perubahan yang terjadi (konservatisme) (Hobsbawm 1981). Dari aspek keanggotaan, Hobsbawm mengidentifikasi kebanyakan di antaranya merupakan kaum pekerja, buruh, mantan narapidana dan anggota militer yang mayoritas adalah laki-laki (Hobsbawm 1981). Konsepsi ini merupakan hasil studi komparasi yang dilakukan di Indonesia, Tiongkok, dan Eropa – terutama Italia.

Sependapat dengan Hobsbawm, Ian Wilson membangun konsepsi yang hampir sama dengan Hobsbawm mengenai *gangster*. Namun, dalam salah satu risetnya mengenai *gangster* di DKI Jakarta, Wilson coba menggarisbawahi bahwa *gangster* juga merupakan perwujudan dari kekuasaan yang bersifat maskulin – dimana hal ini merupakan salah satu perwujudan kultural masyarakat setempat (Wilson 2010). Di samping itu, eksistensi *gangster* yang semakin berbasis teritorial sendiri merupakan salah satu bentuk konformitasnya terhadap pergantian rezim. Dalam risetnya pula, Wilson mengamini kedekatan hubungan antara *gangster* dengan elite politik tingkat nasional – dalam hal ini Hercules Rosario Marcal dengan Prabowo Subianto.¹

Selanjutnya Vedi R. Hadiz juga cukup banyak membahas mengenai *gangster* dalam beberapa kajiannya yang menyoroti tentang rezim pasca-otoritarian di Indonesia. Hadiz (2010) menjelaskan, *political gangster* di era pasca-otoritarian Indonesia tak dapat dimusnahkan – walaupun instrumen ini merupakan peninggalan era Orde Baru Soeharto. Dengan lugas Hadiz menjelaskan bahwa memiliki kedekatan dengan *political gangster* menjadi penting dalam praktek demokrasi elektoral di era pasca-otoritarian ini karena *political gangster* dilihat sebagai sumber kekuasaan baru (Hadiz, 2010: 132). Konsep Hadiz tentang *political gangster* sendiri juga merupakan hasil studi komparasinya di beberapa daerah di Indonesia – seperti Jawa Timur dan Sumatra Utara, Thailand, dan Filipina.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *local gangster* erat kaitannya dengan proses demokrasi elektoral di tingkat lokal – terutama di era pasca-reformasi ini. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung saat ini tak lagi hanya dimaknai sebagai bentuk perwujudan cita-cita reformasi tentang kedaulatan rakyat. Jika ditarik ke tingkat lokal, pemilihan kepala daerah sendiri malah menjadi sebuah ajang untuk mempertontonkan “perdagangan” suara serta membangkitkan kembali praktek politik identitas (Bayo dan Samadhi dalam Bayo dkk 2018: 12). Gambaran pemilihan kepala daerah dengan perspektif lokal tersebut

¹ Lebih lanjut lihat Wilson, Ian. 2014. *The Perils of Loyalty*. Dalam laman <http://www.newmandala.org/the-perils-of-loyalty/> (diakses pada 12 September 2018)

nyatanya tak lepas dari peran kelompok-kelompok informal seperti *local gangster*. Konflik kalah-menang yang disajikan dalam pemilihan kepala daerah sendiri semakin meninggikan nilai tawar *local gangster* untuk juga ikut berperan sebagai faktor kemenangan. Dengan kata lain, pemilihan kepala daerah telah berhasil menghadirkan *local gangster* sebagai aktor di dalamnya.

Fenomena munculnya *local gangster* dalam politik lokal di era pasca-reformasi ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di Banten, kelompok Jawara menjadi kelompok yang diperhitungkan karena memiliki pengaruh yang kuat dalam percaturan politik lokal setempat (Romili dalam Hutabarat 2012).² Dalam penelitiannya, Romili (2007 (dalam Hutabarat 2012)) menyatakan bahwa kelompok Jawara telah berhasil mengantarkan salah satu anggotanya menjadi Wakil Gubernur Banten. Tak hanya itu, para elite Jawara sendiri ternyata juga memiliki kedekatan dengan salah satu partai politik – Partai Golkar – dan menjadikannya sebagai artikulasi kepentingan politik, terlebih dalam konteks politik elektoral (Alamsyah 2009). Terakhir, dalam Pilkada Banten 2017, salah satu calon wakil gubernur, Embay Mulya Syarief, merupakan putra dari pendiri Jawara – Haji Syarief.³

Tak hanya terjadi di Banten, hal ini juga terjadi di DKI Jakarta. Melalui salah satu penelitiannya, Ian Wilson menjelaskan mengenai kemunculan Forum Betawi Rempug (FBR). Secara historis, kemunculan FBR dipicu oleh konflik antar-kelompok Madura dan Betawi di daerah Jakarta Timur pada pertengahan 2000 hingga 2001 (Wilson dalam Aspinall dan van Klinken 2011). FBR muncul untuk menguatkan identitas betawi pasca kejadian tersebut. Kedekatan FBR dengan beberapa elite politik lokal, seperti Sutiyoso, menandakan posisi nilai tawar FBR yang tinggi – baik dalam konteks lobi politik maupun bisnis. Dalam Pilkada DKI

² Kelompok Jawara sendiri merupakan gabungan dari masyarakat di Banten yang memiliki kemampuan bela diri tradisional (*debus*). Kelompok ini banyak digambarkan selalu menggunakan pakaian serba hitam lengkap dengan peci hitam dan sebuah golok (Muslim dkk 2016) Secara historis, Jawara ikut andil dalam melawan penjajahan kolonialisme Belanda. Berbekal supremasinya di masa lalu, di era pasca-reformasi ini Jawara termasuk dalam sirkulasi elite lokal Banten bersamaan dengan elite partai politik, kyai (ulama), militer, dan birokrat (Muslim dkk 2016)

³ Lihat lebih lanjut <https://kumparan.com/@kumparannews/dua-pasang-jawara-bertarung-di-banten> (diakses pada 14 September 2018)

Jakarta 2017 lalu, FBR menyatakan sikap untuk mendukung ketiga pasang calon yang ikut dalam kontestasi di putaran pertama – meskipun hal ini menandakan FBR tidak satu suara dalam momentum pilkada lalu.⁴

Dalam pengalaman Bali, *local gangster* bahkan berhasil mengusung Gubernur Bali untuk maju dalam dua periode kepemimpinan. Adalah I Made Mangku Pastika, seorang purnawirawan Kepolisian RI (Polri), yang berhasil memimpin Bali selama dua periode terhitung mulai 2008 hingga pertengahan 2018. Kesuksesan Pastika menduduki jabatan sebagai Gubernur Bali merupakan campur tangan kuat dari Laskar Bali. Pada periode kedua terpilihnya Pastika, I Ketut Rochineng – yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Harian Ormas Laskar Bali – mendapat jabatan sebagai Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bali (Bachelard 2014). Hal tersebut merupakan perwujudan politik transaksional yang terjadi antara gubernur terpilih dengan *local gangster* yang telah loyal mendukungnya.

Menguatnya pewacanaan mengenai masyarakat sipil pasca rezim Orde Baru menjadi momentum bagi *local gangster* untuk pula ada di dalamnya. Terlebih dalam praktek demokrasi elektoral di tingkat lokal, *local gangster* bermimikri menjadi kepanjangan tangan bagi masyarakat. Dalam pengalaman Bali, Laskar Bali dan Baladika menjadi dua *local gangster* terkuat – dan paling lama eksis. Dalam beberapa momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bali, kedua *local gangster* ini selalu menyatakan sikap dukungannya kepada salah satu pasangan calon – baik bupati, walikota, serta gubernur. Di balik beragam alasan yang melandasi pernyataan dukungan mereka, terdapat satu alasan kuat: trah bangsawan lokal Bali. Alasan tersirat ini seakan mengamini keinginan masyarakat Bali ketika melihat pemimpin. Dalam diam, *local gangster* membantu menyukseskan agenda

⁴ Lebih lanjut lihat

<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/20/17132231/fbr.jaktim.deklarasi.dukungan.untuk.agus-sylviana.dalam.pilkada.dki> ; <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/04/13/fbr-jakarta-selatan-deklarasikan-dukungan-untuk-ahok-djarot> ; <https://news.okezone.com/read/2016/10/18/338/1517874/ogah-pilih-pasangan-petahana-fbr-buka-peluang-dukung-anies-sandiaga> (diakses pada 14 September 2018)

kebangkitan bangsawan adat yang terus dilakukan di Pulau “Seribu Pura” pada era pasca-otoritarian.

1.1.1 Memaknai Transisi Rezim Otoritarian Menuju Pasca-Otoritarian

Eksistensi *gangster* serta momentum bangkitnya bangsawan dalam praktek politik sendiri perlu dipahami melalui konteks rezim yang melatarbelakanginya. Adalah transisi dari rezim otoritarian (Soeharto) menuju pasca-otoritarian yang menguatkan eksistensi *gangster* serta momentum kebangkitan bangsawan (adat). Sebelum lebih jauh membahas mengenai transisi rezim tersebut, penulis terlebih dahulu ingin mendudukan pemahaman mengenai rezim otoritarian. Rezim otoritarian dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Dalam kerangka rezim otoritarian, perlu dipahami bahwa eksistensi *gangster* semakin langgeng. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, langgengnya eksistensi *gangster* di era otoritarian merupakan siasat Soeharto untuk menjaga “ketertiban sosial” dari munculnya paham komunisme serta pihak-pihak yang kontra selama pemerintahannya. Namun, yang menjadi penting dalam melihat eksistensi *gangster* di era otoritarian adalah kepemimpinannya yang masih cenderung tersentralisasi dan satu komando. Tak hanya langgengnya eksistensi *gangster* yang menjadi poin utama dalam konteks rezim otoritarian, tetapi juga mengenai instrumen adat yang didiskreditkan. Sebagai konsekuensi dari banyaknya tekanan yang datang semasa kepemimpinan otoritarian Soeharto – seperti pemberlakuan ideologi tunggal Pancasila serta masifnya praktek modernitas yang dilakukan⁵, eksistensi instrumen adat semakin terpinggirkan. Selain itu, rezim otoritarian juga menghasilkan stagnasi politik lokal karena praktek otonomi daerah yang urung dilakukan. Geliat politik lokal di era otoritarian sendiri

⁵ Praktek modernitas dalam konteks ini dipahami dalam wujud penggunaan instrumen pemerintahan modern, seperti birokrasi, eksistensi desa dinas, dan hal serupa lainnya (Hauser-Schäublin dalam Davidson dan Henley 2011: 195)

belum mampu melahirkan aktor – maupun agensi – bagi berlangsungnya politik lokal.

Transisi yang terjadi seiring dengan lengsernya Soeharto dari tampuk kepemimpinan mengantarkan pada pemaknaan rezim yang berbeda, yakni rezim pasca-otoritarian. Era pasca-otoritarian ini membawa angin segar, baik bagi eksistensi *gangster* sendiri maupun bagi kekuatan instrumen adat. Praktek otonomi daerah menjadi penanda bahwa eksistensi *gangster* dapat menyentuh tataran lokal (daerah) dan instrumen adat dapat bangkit kembali menjadi “raja” di tanahnya sendiri – karena momentum kebangkitan adat dan nilai lokalitas pasca tekanan yang dilakukan oleh rezim otoritarian (Davidson dan Henley 2011: 5). Dalam konteks Bali, transisi yang terjadi dari rezim otoritarian menuju pasca-otoritarian dapat dilihat melalui posisi *gangster* yang menyentuh tataran lokal. Bahkan kemunculan *gangster* di tingkat lokal dibarengi dengan akomodasi nilai lokalitas Bali. Dalam kerangka instrumen adat, hal ini perlu dimaknai melalui eksistensi desa adat (*pakraman*) yang kembali menduduki posisi sentral.

Namun, konteks pasca-otoritarian dalam penelitian ini tak semata-mata dipahami sebagai momentum pergeseran rezim. Konteks pasca-otoritarian dalam penelitian ini coba penulis batasi hanya pada perhelatan pemilihan kepala daerah langsung – yang merupakan kausalitas dari runtuhnya rezim Orde Baru dan praktek otonomi daerah. Dalam pengalaman Bali, pemilihan kepala daerah secara langsung mulai berlangsung sejak 2008. Pembatasan makna pasca-otoritarian pada praktek pemilihan kepala daerah langsung ini mempermudah identifikasi latar belakang waktu dalam penelitian ini. Pemilihan batasan waktu dalam memaknai konteks pasca-otoritarian ini juga dilakukan untuk mempermudah identifikasi penulis mengenai pihak-pihak mana saja yang memiliki peranan penting dalam alam politik lokal Bali.

1.1.2 Pasca-Otoritarian dalam Alam Politik Bali

Dalam konteks Bali, era pasca-otoritarian dibatasi sejak momen pertama Bali menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung di 2008. Fenomena ini mulai terlihat ketika Pemilihan Gubernur Bali pertama kali dilaksanakan secara langsung pada 2008. Adalah I Made Mangku Pastika yang telah berhasil selama dua periode memenangkan Pilkada Provinsi Bali pada periode 2008-2013 dan periode 2013-2018. Kemenangannya selama dua periode berturut-turut ini juga merupakan buah dari dukungan Laskar Bali. Menurut Made Supriatma, I Made Mangku Pastika ini merupakan donatur besar Laskar Bali (Matanasi 2017).

Namun, yang perlu dilihat lebih lanjut adalah narasi bangsawan lokal yang belum berhasil dibangun pada Pemilihan Gubernur Bali dua periode lalu. Pada Pemilihan Gubernur 2008, kontestasi diramaikan dengan calon-calon dengan latar belakang purnawirawan Polri. Akhirnya Pemilihan Gubernur saat itu hanya disibukkan dengan isu faksionalisasi kepolisian daerah. Pada Pemilihan Gubernur 2013, narasi bangsawan gagal dibangun karena posisi petahana yang terlampau kuat dan didukung oleh sembilan partai politik. Meskipun hanya terdapat dua calon dan salah satunya merupakan calon dengan latar belakang bangsawan, yaitu Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, narasi bangsawan tak mampu melawan kekuatan petahana saat itu.

Geliat *local gangster* pun berlanjut pada Pilkada Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pada 2015. Pada Pilkada Kota Denpasar, dari ketiga pasang calon yang ikut serta dalam kontestasi, pasangan I.B Rai Dharmawijaya Mantra-I.G.N Jayanegara yang mendapatkan dukungan paling banyak dari *local gangster*. Adalah Baladika dan Pemuda Bali Bersatu – yang merupakan organisasi sayap dari Laskar Bali – yang menyatakan dukungannya kepada pasangan ini. Hal ini bukanlah tanpa sebab, I.B Rai Dharmawijaya Mantra merupakan kader dari Pemuda Bali Bersatu. Ia juga putra dari Gubernur Bali periode 1978-1988, Ida

Bagus Mantra, yang sama-sama berasal dari Kasta Brahmana.⁶ Sedangkan pada Pilkada Kabupaten Badung, pasangan I Nyoman Giri Prasta-I Ketut Swiyasa mendapat dukungan penuh dari Baladika. Kabupaten Badung sendiri merupakan wilayah terkuat Baladika. Selain hal itu, I Nyoman Giri Prasta merupakan kader dari Baladika (Zuryani dkk 2018). Hal ini menunjukkan keberhasilan *local gangster* dalam praktek demokrasi elektoral di tingkat lokal.

Kedekatan *local gangster* sebagai kelompok informal dengan praktek demokrasi elektoral di daerah semakin terlihat mesra. Momen Pemilihan Gubernur Bali 2018 lalu pun tak absen dari peran *local gangster* untuk mengambil sikap mendukung salah satu pasangan calon. Yang berbeda, pernyataan dukungan pada periode ini juga mempertimbangkan latar belakang Puri – atau disebut pula istana atau kraton dalam konsepsi Jawa – dari pasangan calon yang berlaga. Ini menjadi menarik karena narasi bangsawan adat absen muncul dalam pemilihan gubernur di dua periode sebelumnya.

Pemilihan Gubernur Bali 2018 lalu menyajikan dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu: pasangan nomor urut satu, I Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace); dan pasangan nomor urut dua, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan I Ketut Sudikerta. Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara resmi KPUD Provinsi Bali, pasangan urut nomor satu dinyatakan memenangkan pemilihan gubernur dan terpilih menjadi Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 (bali.kpu.go.id 2018).

⁶ Kakek dari I.B Rai Dharmawijaya Mantra merupakan seorang Pendeta di salah satu Puri di Bali

Tabel 1.1. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Bali 2018

Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase Suara
I Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (nomor urut 1)	1.213.075 suara	57,68 persen
Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan I Ketut Sudikerta (nomor urut 2)	889.930 suara	42,32 persen

(diolah dari berbagai sumber)

Kesuksesan Koster-Cok Ace memenangkan Pemilihan Gubernur Bali 2018 menghadirkan analisa yang tak sedikit jumlahnya. Namun yang jadi menarik adalah pemilihan Cok Ace sebagai calon wakil gubernur. Cok Ace memiliki latar belakang keturunan bangsawan dari Puri Ubud – yang bahkan saat ini menjabat sebagai Raja Ubud. Pencalonan Cok Ace seakan membuktikan supremasi bangsawan lokal yang masih berkuasa atas masyarakat – di antara banyaknya puri yang sudah tak berkuasa lagi.

Hal ini menarik perhatian bagi dua organisasi masyarakat ekstra-legal – bagaimana Vedi R. Hadiz coba menggambarkan *gangster* – terbesar di Bali: Laskar Bali dan Baladika. Kedua ketua umum hadir dalam deklarasi dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini yang dilakukan di Art Center, Denpasar.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kedua *local gangster* mendukung pasangan Koster-Cok Ace dalam Pemilihan Gubernur Bali 2018.

Seperti yang telah dijelaskan di bagian awal, penelitian ini lebih lanjut membahas mengenai *local gangster* dalam pusaran demokrasi elektoral di daerah, yaitu pemilihan kepala daerah di era pasca-otoritarian. Melihat fenomena serupa

⁷ Lebih lanjut lihat <http://www.balipost.com/news/2018/02/01/36290/Deklarasi-KBS-Ace-Kota-Denpasar-Digelar...html> (diakses pada 15 September 2018)

juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia, Provinsi Bali akhirnya dijadikan pilihan untuk mendalami tentang fenomena ini. Dalam pengalaman Bali sendiri, budaya Hindu-Bali menjadi episentrum kehidupan. Hal ini tergambarkan melalui eksistensi desa pakraman (desa adat) yang lebih dilegitimasi oleh masyarakat Bali. Alasan pemilihan Bali sebagai lokasi penelitian sendiri didasarkan pada penelitian dan literatur dengan kajian serupa yang belum begitu banyak. Absennya peneliti serta publikasi lokal yang mengangkat mengenai permasalahan ini juga menjadi alasan selanjutnya. Dari perspektif keilmuan, menjadi penting untuk mengetahui dan menggali lebih dalam mengenai artikulasi kepentingan yang dibawa oleh *local gangster* selaku kelompok informal dalam tatanan demokrasi Indonesia pasca-reformasi. Terlebih di era desentralisasi, *local gangster* semakin menonjolkan nilai lokalitasnya sebagai nilai tawar – terlebih dalam proses demokrasi elektoral. Dengan juga melihat periode pilkada sebelum-sebelumnya, penelitian ini tak hanya mencoba mengeksplanasi realitas politik yang terjadi di satu periode pilkada saja tetapi juga melihatnya berdasarkan perspektif historis.

1.2 Rumusan Masalah

Munculnya beberapa asumsi mengenai alasan mengapa Laskar Bali dan Baladika tak pernah absen mendeklarasikan dukungannya pada setiap Pemilihan Gubernur Bali mengantarkan penulis pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *local gangster* di Bali menggalang kekuatannya pada Pemilihan Gubernur Bali di era pasca-otoritarian?
2. Bagaimana *local gangster* memaknai kebangkitan bangsawan lokal dalam kepemimpinan di Bali di era pasca-otoritarian?

Pembatasan masalah pada penelitian ini difokuskan pada Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur) Bali era pasca-otoritarian dengan menjadikan Laskar Bali dan Baladika sebagai representasi *local gangster* Bali yang akan diteliti. Eksplanasi juga didukung dengan realitas politik yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah

Bali secara langsung di setiap periode, terhitung mulai periode 2008, 2013, hingga 2018.

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui cara *local gangster* di Bali – yang dalam hal ini adalah Laskar Bali dan Baladika – menggalang kekuatannya pada Pemilihan Gubernur Bali di era pasca-otoritarian
- Untuk mengetahui pandangan *local gangster* dalam memaknai kebangkitan bangsawan adat dalam kepemimpinan yang ada di Bali di era pasca-otoritarian.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- Memberikan kontribusi penelitian dalam studi politik lokal tentang eksistensi kelompok informal – yang dalam hal ini adalah *local gangster* – pada era pasca-otoritarian
- Memperluas perspektif tentang dinamika eksistensi *local gangster* pada era pasca-otoritarian

1.4.2 Manfaat Praktis

- Menambah informasi bagi pihak yang memiliki ketertarikan akan kajian politik lokal di Indonesia, terutama di Bali
- Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik mengenai *local gangster* dalam dinamika politik lokal

1.5 Kerangka Konseptual dan Teoretik

1.5.1 Konsep *Local Gangster*

Konsepsi ini digunakan untuk menggambarkan kelompok preman (*gangster*) yang dilembagakan dan berada di tingkat lokal. Pada awalnya, konsepsi ini fokus pada penggambaran *gangster* di tingkat pusat. Seiring dengan berjalannya praktek desentralisasi, eksistensi *gangster* juga bergerak di tingkat lokal (daerah).

Hobsbawm (1981) menyajikan konsep monumental mengenai *social bandits*. Dalam bukunya yang berjudul *Bandits*, Hobsbawm mendefinisikan *social bandits* sebagai pelanggar hukum atau pelaku kriminal (Hobsbawm 1981: 17). Berdasarkan studi komparasinya di beberapa negara di Eropa, Tiongkok, dan Indonesia, kemunculan bandit dimaknai beragam, seperti simbol dari kekacauan di masyarakat, pertanda munculnya kelas baru dalam masyarakat, serta bentuk resistensi terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat (Hobsbawm 1981). Munculnya *social bandits* dalam tatanan masyarakat sesungguhnya untuk melaksanakan tertib sosial – sehingga masyarakat nantinya dapat sesuai dengan bentuk ideal yang diimajinasikan. Dalam dimensi ekonomi-politik, *social bandits* memiliki posisi yang dapat diperhitungkan. Mereka memiliki kedekatan dengan para pelaku bisnis – bahkan para pelaku bisnis pun menjadi anggota mereka. Hal ini lah yang menyokong eksistensi mereka.

Penamaan konsep cenderung berubah ketika disajikan oleh para peneliti Indonesianis. Adalah Vedi R. Hadiz (2010) yang banyak menyajikan studi kasus tentang fenomena *political gangster* di Asia Tenggara – dengan fenomena di Indonesia yang lebih banyak, Filipina, serta Thailand – yang eksistensinya semakin sporadik pasca lengsernya rezim otoriter. Hadiz juga lebih komprehensif dalam menjelaskan *political gangster* dalam pengalaman Indonesia. *Political gangster* sendiri dimaknai sebagai mesin partai politik dan cenderung tidak memiliki afiliasi resmi terhadap partai politik tertentu (Hadiz 2010: 151). Selain itu, *political gangster* juga menjadi sumber kekuasaan baru di era demokrasi elektoral karena

kontestasi yang makin bersifat *high-cost* dan sarat akan praktek kekerasan oleh para *militia* (Hadiz 2010: 132-133).

1.5.2 Konsep Bangsawan Lokal

Bangsawan di Indonesia pada umumnya sering dikaitkan dengan keluarga atau mereka yang masih memiliki hubungan darah dari kerajaan atau kesultanan tertentu yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Eksistensinya yang sudah lebih dulu ada, membuat masing-masing kerajaan ini memiliki akar nilai sejarah yang sangat kuat. Pada eranya pula, kerajaan dan kesultanan di Indonesia memiliki bentuk organisasi seperti bentuk negara (Van Klinken dalam Davidson dan Henley 2007: 150). Tak jarang tata kelola pemerintahan Indonesia banyak diadaptasi oleh tata kelola pemerintahan kerajaan-kerajaan ini. Maka dari itu, dalam struktur sosial masyarakat Indonesia sendiri, kaum bangsawan masih menempati posisi tinggi dan banyak diagungkan.

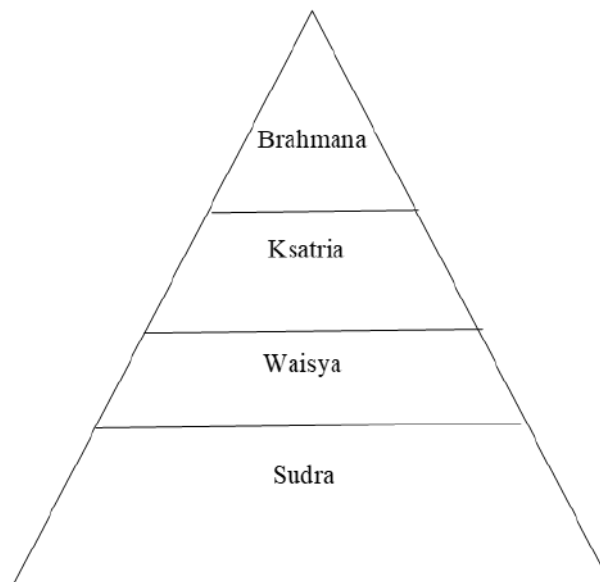
Pembahasan mengenai konsepsi bangsawan terkadang memiliki makna yang tumpang tindih dengan konsep lainnya. Di Jawa sendiri, konsep bangsawan seringkali bertabrakan dengan konsep priayi (Geertz 2013, Dwipayana dalam Gunawan dkk 2005: 140). Geertz (2013) mendefinisikan priyayi sebagai sebuah golongan intelektual – yang juga memiliki status sosial yang tinggi dalam struktur masyarakat Jawa, dimana hal ini diklasifikasikan dengan tingkat pendidikan para priyayi yang terbilang tinggi. Tak heran di era pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kaum priyayi ini banyak menduduki posisi sebagai birokrat dan pejabat daerah (Geertz 2013). Hal ini menyimpulkan bahwa status sosial tinggi yang dimiliki golongan priyayi merupakan *achieved status*. Jauh berbeda dengan golongan bangsawan, yang mana status sosial mereka yang tinggi ditentukan oleh darah keturunan dan hal ini bersifat *ascribed* (Dwipayana dalam Gunawan dkk 2005: 140).

Di Indonesia sendiri, konsep bangsawan yang ada sama seperti di negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand.

Hal ini dilatarbelakangi kekuatan dan pengaruh Kerajaan Majapahit ketika menguasai wilayah Nusantara dan ekspansinya ke negeri-negeri seberang (Raditya 2018). Bahkan di era demokrasi modern ini eksistensi bangsawan tidak meredup. Akan tetapi, eksistensinya yang tak meredup ini memiliki wajah yang berbeda di masing-masing negara tersebut – karena masing-masing negara memiliki ciri khasnya. Dalam pengalaman Malaysia, kekuatan para bangsawan hanya pada tataran simbolik. Berbeda pula dengan pengalaman Brunei Darussalam dimana para bangsawan berhasil menguasai sistem politik dan pemerintahan menjadi monarki absolut. Hal ini juga disertai dengan penguasaan perminyakan di negara tersebut. Sedangkan dalam pengalaman Thailand, para bangsawan semakin berkuasa setelah pada 1970 Sang Raja memantapkan posisinya sebagai pemimpin negeri (Van Klinken dalam Davidson dan Henley 2007: 150). Kershaw (2001) menyatakan bahwa dalam pengalaman Indonesia modern, eksistensi bangsawan lebih banyak digunakan untuk kepentingan pariwisata di daerah.⁸ Dalam konstelasi politik nasional, kaum bangsawan belum menampakkan taringnya seperti apa yang dilakukan kesultanan di Brunei Darussalam. Cakupan supremasi bangsawan di Indonesia masih pada tataran lokal (daerah).

⁸ Hal ini merujuk pada kawasan kerajaan yang kebanyakan dibuka untuk umum dan dijadikan sebagai destinasi pariwisata daerah tersebut. Setidaknya terdapat beberapa nama seperti Kesultanan Yogyakarta, Keraton Surakarta, serta Puri Agung Ubud.

Dalam konteks penelitian ini, konsep bangsawan yang digunakan merujuk pada Bangsawan Lokal Bali. Dalam pemaknaan bangsawan lokal Bali, kaum bangsawan menempati hierarki kasta ksatria.



*Gambar 1.1 Piramida Kasta Masyarakat Bali
(diolah dari berbagai sumber)*

Dalam struktur masyarakat Bali yang seperti ini, latar belakang kasta yang dimiliki oleh seseorang telah ditentukan sejak ia lahir. Latar belakang keluarga menjadi penentu utama dari label kasta yang dimiliki oleh seseorang. Merujuk pada gambar di atas, terdapat empat kasta yang eksis dalam struktur sosial masyarakat Bali. Kasta Brahmana menjadi kasta tertinggi dengan komposisi para pemuka agama dan keturunannya. Di bawah kedudukan Kasta Brahmana terdapat Kasta Ksatria, yang mana diisi oleh para prajurit (pejuang) yang merujuk pada kaum bangsawan dan kerajaan beserta keturunannya. Di bawah kedudukan Kasta Ksatria ialah Kasta Waisya yang memiliki komposisi kaum pedagang, petani, serta birokrat pemerintahan. Terakhir adalah Kasta Sudra yang menempati struktur masyarakat paling rendah, dimana menurut Ambedkar (1946) kasta ini merupakan pelayan bagi kasta-kasta yang berada di atasnya.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaum bangsawan berada dalam Kasta Ksatria – yang mana hierarkhi kasta tersebut terbilang tinggi – yang mana kaum bangsawan memiliki status yang bersifat *given (ascribed status)*. Dengan status yang dimiliki oleh masyarakat Bali sejak mereka lahir, mobilisasi yang terjadi dalam hierarkhi kasta ini bersifat tertutup – dimana mereka yang memiliki hierarkhi kasta lebih rendah tidak bisa mencapai kasta yang tingkatnya lebih tinggi, begitu pula sebaliknya.

Kaum bangsawan yang menempati kasta ksatria ini sendiri dapat diidentifikasi menggunakan awalan nama yang mereka miliki. Awalan nama yang biasanya digunakan oleh para bangsawan ini ialah Anak Agung, Cokorda, Desak, atau Gusti (Wiana dan Santeri 1993). Penggunaan awalan nama yang mencerminkan hierarkhi kasta yang dimiliki ini sejatinya sudah dilakukan sejak abad ke-14 – yang merupakan era pemerintahan keempat Kerajaan Gelgel. Dalam perjalanannya, banyaknya kerajaan disintegrasi kerajaan besar di abad 18 bernama Kerajaan Gelgel (Suwitha 2015: 108). Pasca perpecahan ini, di abad 19 kekuatan dari Kerajaan Gelgel tersebar dan melahirkan sepuluh kerajaan baru. Seiring dengan berjalannya waktu, rivalitas pun muncul di antara kerajaan-kerajaan tersebut dan pada akhir abad ke-19, tersisa delapan kerajaan besar yang menjadi cikal bakal jumlah kabupaten di Bali. Dalam penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa Kerajaan Gelgel merupakan cikal bakal dari kaum bangsawan yang masih tetap eksis hingga saat ini.

1.5.3 Kebangkitan Adat

Davidson dan Henley (2007) melihat adanya perbedaan konsep antara adat dan kebangkitan adat. Adat secara harafiah didefinisikan sebagai tradisi atau budaya. Sedangkan kebangkitan adat dimaknai sebagai bagian dari tradisionalisme – dalam artian sebuah paham. Seiring dengan munculnya narasi kebangkitan adat, terdapat pergeseran pemahaman tentang adat itu sendiri. Melalui konteks politik kontemporer, adat dipahami melalui dua bentuk: (1) seperangkat hak serta

kewajiban yang sifatnya mengikat kesejarahan, wilayah, dan hukum di dalamnya, serta (2) seperangkat gagasan mengenai masyarakat ideal (Davidson dan Henley 2007: 2-3)

Lebih lanjut dalam konteks Indonesia, kebangkitan adat dapat dilihat menggunakan empat perspektif. *Pertama*, hal ini dilihat sebagai bentuk keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia (Davidson dan Henley 2007: 5). Dengan menggunakan perspektif ini, kebangkitan adat dilihat terjadi dengan sendirinya. *Kedua*, dampak dari tekanan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru (Davidson dan Henley 2007: 5). Pluralisme *a la* Suharto berdampak pada kebebasan masyarakat (adat) untuk menunjukkan identitas mereka. *Ketiga*, kesempatan untuk eksis di era reformasi (Davidson dan Henley 2007: 5). Perspektif ini tak jauh berbeda dengan sebelumnya – yang memosisikan rezim Orde Baru sebagai penekan kebebasan menunjukkan identitas. *Keempat*, narasi nasionalisme yang selalu dimunculkan sejak awal abad 20 (Davidson dan Henley 2007: 5). Dalam hal ini, nasionalisme menggugurkan makna perjuangan masyarakat adat di daerah pada waktu itu dan menyebabkan munculnya marginalisasi dan juga ketidaksetaraan.

Dalam konteks Indonesia pasca-reformasi, kebangkitan adat semakin sporadik. Hal ini didukung oleh praktek desentralisasi dan juga demokrasi elektoral di tingkat lokal yang ternyata menjadi alasan terbukanya keran-keran kebangkitan adat di daerah. Dalam konteks Bali, kebangkitan adat sendiri banyak dimaknai sebagai sebuah pelestarian nilai-nilai asli Hindu-Bali. Terdapat pula yang menerjemahkannya sebagai sebuah bentuk resistensi terhadap nilai-nilai yang datang dari luar Bali – termasuk terhadap para transmigran. Kebangkitan adat juga dimaknai sebagai *starting point* bagi para kaum bangsawan untuk memanfaatkannya sebagai kendaraan merebut kembali masa kejayaannya di era pasca-otoritarian ini.

1.5.4 Teori Populisme

Penelitian ini menggunakan kerangka teori populisme untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai fenomena *local gangster* dan kebangkitan bangsawan lokal di Bali. Pemilihan teori populisme ini didasarkan pada fenomena penguatan masyarakat sipil di Bali pada era desentralisasi serta bangkitnya kekuatan etnisitas yang pada era otoritarian Soeharto kehilangan supremasinya. Adanya artikulasi yang dibentuk berupa perjuangan mengembalikan supremasi adat serta upaya untuk melakukan konfrontasi untuk mengubah relasi kuasa yang ada sebelumnya.

Populisme – menurut beberapa sarjana ilmu politik – terbilang sulit untuk menemukan definisinya. Hal ini dikarenakan populisme tidak memiliki “pakem” definisi yang jelas di kalangan sarjana ilmu politik. Maka dari itu, beberapa sarjana ilmu politik cenderung berbeda dalam mengonsepsikan definisi populisme. Germani sebagaimana dikutip oleh Laclau (2005) coba mendudukan definisi populisme yang sebenarnya, yang mana menurutnya populisme sendiri tak bisa diklasifikasikan hanya dengan dikotomi “kiri” ataupun “kanan”. Tidak ada definisi yang bisa dengan jelas menggambarkan apa itu populisme, namun menurutnya terdapat beberapa kecenderungan yang bisa dilihat dari beberapa fenomena populisme yang terjadi. Menurutnya, populisme merupakan sebuah gerakan yang memiliki komposisi kelas yang beragam (Germani, 1978). Populisme juga memiliki tuntutan yang berkaitan dengan kesetaraan hak-hak politik. Mengacu pada konteks kondisi sosial dan budaya pada suatu masyarakat, terkadang terdapat pula tuntutan penegasan hak-hak masyarakat yang dihadapkan dengan kelompok yang memiliki *privilege* (Germani, 1978). Berbeda dengan Germani dalam mendudukan definisi populisme, Canovan, sebagaimana dikutip dalam Panizza (2005), melihat populisme – terutama yang terjadi dalam masyarakat demokrasi modern – adalah sebuah pendekatan kepada apa yang dikonsepsikan sebagai *the ‘people’* melawan struktur kekuasaan, nilai, serta gagasan yang berkembang dalam masyarakat. Namun, terdapat pula definisi lain yang menggunakan pendekatan gerakan sosial. Kenneth Minogue, sebagaimana dikutip dalam Laclau (2005), menyatakan bahwa terdapat konsep retorik dan ideologi yang sering diplagiasi oleh sebuah gerakan

populis tertentu untuk dijadikan sebagai nilai tawar. Namun menurutnya, kebanyakan gerakan populis sendiri hanya bersifat retorik dan memiliki basis ideologi yang dangkal yang akhirnya menjadikan gerakan populis tidak bersifat mengakar (Laclau 2005: 11).

Namun terdapat sebuah kesepakatan bersama mengenai populisme, yaitu adanya dikotomi antara *the 'people'* dengan *'the elite'*. Dikotomi antara *the 'people'* dengan *the 'elite'* tak selamanya dimaknai sebagai masyarakat multi kelas yang vis-à-vis golongan dengan *privilege* tertentu. *The 'elite'* bisa dimaknai sebagai sebuah sistem – yang dianggap antagonis oleh *the 'people'*. Populisme tidak hanya dilihat sebagai konsekuensi dari krisis ekonomi dan politik yang sedang terjadi, tetapi juga dapat dimaknai sebagai bentuk perjuangan dari mereka yang sebelumnya tidak pernah direpresentasikan – dalam konteks kelas, religi (agama), etnisitas, juga lokasi geografi (Panizza 2005). Pendapat para sarjana ilmu politik juga terbelah dalam melihat hubungan populisme dan demokrasi. Dalam kuliah umumnya, Vedi R. Hadiz (2017) mengatakan bahwa populisme dan demokrasi dapat berdampingan – dengan konsekuensi kehadiran populisme akan memengaruhi jalannya rezim demokrasi. Panizza (2005) melihat bahwa populisme sesungguhnya dapat membuka *blindspots* yang terdapat dalam demokrasi liberal. Dalam hal ini, demokrasi liberal masih menyimpan banyak kekurangan – termasuk tidak dapat merealisasikan janji-janji demokrasi liberal yang sebelumnya ditawarkan. Tak sedikit pula yang melihat hubungan antara populisme dan demokrasi sebagai hubungan yang merugikan. Menurut Meny dan Surel (2002), populisme merupakan sebuah bentuk patologi demokrasi karena menurutnya kaum populis hanya menggunakan hal ini untuk kepentingan politik semata. Sependapat dengan Meny dan Surel, Muhtadi (2015) melihat bahwa sifat populisme yang cenderung eksklusif malah membuatnya bersifat intoleran, rasis, dan *xenophobia*.

1.5.4.1 Populisme: Sebuah Perspektif Historis dan Komparatif

Dalam sejarahnya, populisme bukanlah sebuah teori baru yang nihil akan fenomena terdahulu yang mendukung hadirnya teori ini. Setidaknya ini dibuktikan dengan adanya fenomena yang terjadi di Amerika Latin dan juga Amerika Utara. Dalam konteks pengalaman Amerika Latin, fenomena populisme dapat diidentifikasi melalui sistem politiknya pasca 1930. Adalah Peronisme yang terjadi di Argentina serta Varguisme yang terjadi di Brazil yang menginisiasi fenomena populisme di Amerika Latin (Hadiz 2016: 21). Dua fenomena yang terjadi di Amerika Latin tersebut merupakan respon terhadap kebijakan anti-asing Peron dan Vargas yang berdampak pada pembangunan ekonomi yang berjalan di kedua negara tersebut.

Dalam konteks Peronisme, Juan Domingo Peron, selaku Presiden Argentina periode 1946-1955 yang dilanjutkan lagi di periode keduanya pada 1973-1974, menerapkan tiga kebijakan utama selama pemerintahannya: (1) keadilan sosial, (2) kemandirian ekonomi, serta (3) kedaulatan politik. Tak hanya itu, inti dari pemikiran (kebijakan) Peronism adalah konsistensi penolakan terhadap paham komunisme dan kapitalisme – sehingga singkat kata Peronism juga dapat diartikan sebagai kebijakan anti-asing. Tak hanya berlaku pada segi tata kelola pemerintahan, Peronisme juga berlaku sebagai nilai yang dijunjung dan dikampanyekan oleh partai politik pengusung Peron. Seringkali, kebijakan Peronisme dikaitkan dengan gerakan populisme yang nasionalis – karena kebijakannya yang terkesan mengisolasi negaranya dari pihak luar.

Tak jauh berbeda dengan Peronisme, rezim Vargas (periode pertama: 1934-1945; periode kedua: 1951-1954) juga memberlakukan kebijakan serupa. Tepatnya pada 1937, Vargas mendirikan *Estado Novo* (negara baru) dengan rezim otoritarian yang berpadu dengan ultra-nasionalisme. Hal ini dinilai sukses karena Vargas berhasil memperkuat peran negara dalam kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial. Tak hanya di bidang pembangunan ekonomi, Vargas berhasil menghadirkan paham nasionalisme baru dan demokrasi rasial. Peran negara juga semakin diperluas hingga masuk ke ranah adat.

Berbeda dengan konteks populisme yang terjadi di Amerika Latin, pengalaman Amerika Utara dengan populisme lebih banyak bersinggungan dengan gerakan masyarakat. Di Amerika Utara (Amerika Serikat), tradisi populisme bersinggungan dengan persoalan agraria, dimana populisme berwujud gerakan sosial masyarakat multi-kelas yang terdiri dari kelompok-kelompok petani serta pengusaha skala kecil dan menengah (Hofstadter dalam Hadiz 2016: 24). Setidaknya gerakan masyarakat multi-kelas yang terjadi di era 1880-an ini merupakan respon terhadap harga hasil pertanian yang makin turun, sulitnya bagi para petani untuk melakukan kredit, serta beberapa hal lain yang banyak merugikan kelompok petani di Amerika Serikat. Aliansi kelompok petani dan pengusaha tersebut akhirnya menuntut para senator untuk memperbaiki kegagalan kebijakan bagi kelompok tani serta kepemilikan *public goods* – seperti rel kereta – ada di tangan pemerintah. Tuntutan pada saat itu juga berlanjut sampai pada pemilihan senat secara langsung.

Tradisi populisme yang terjadi di Amerika Latin dan Amerika Utara menjadi gerbang pembuka bahwa pada awalnya populisme sukar dipahami sebagai sebuah entitas tersendiri. Populisme selalu bertumpang tindih dengan paham lainnya: nasionalisme atau ultra-nasionalisme seperti yang terjadi di Brazil dan Argentina, *xenophobic* seperti yang beberapa tahun terakhir ini terjadi di Eropa. Hal inilah yang melatarbelakangi ilmuwan politik untuk tidak *rigid* dalam mendefinisikan populisme. Namun, tidak semua ilmuwan politik mendefinisikan populisme secara dinamis. Canovan misalnya, coba untuk mendikotomi pemahaman populisme dengan membaginya menjadi dua klasifikasi, yaitu populisme agraria dengan populisme politik (Laclau 2005: 6). Namun, jika dioperasionalkan dengan fenomena yang terjadi, dikotomi tersebut tidaklah relevan – karena populisme tak dapat dimaknai secara *rigid*. Dengan kata lain, pemahaman yang dinamis mengenai populisme perlu dimiliki oleh para ilmuwan serta sarjana ilmu politik; seperti bagaimana Laclau memaknai populisme dalam teorinya. Operasional teori milik Laclau nihil akan klasifikasi populisme ke dalam dikotomi-dikotomi tertentu. Kajiannya lebih bersifat historis dengan menyajikan pengalaman-pengalaman populisme yang pernah terjadi di beberapa negara.

1.5.4.2 Operasional Teori *a la* Laclau

Penelitian ini menggunakan kerangka teori populisme dengan pendekatan yang cenderung diskursif, yaitu teori populisme milik Ernesto Laclau. Laclau mengonsepsikan populisme sebagai sebuah bentuk antagonisme dari *the 'people'* terhadap pihak antagonistik – yang dapat berupa rezim, relasi oligarkhi, atau kelompok dominan. Terdapat dua prakondisi populisme yang dijelaskan oleh Laclau dalam bukunya yang berjudul *On Populist Reason*, yaitu: (1) antagonisme yang terjadi karena pemisahan *the 'people'* dengan kekuasaan (*power*), serta (2) artikulasi (tuntutan atau *demands*) yang bersifat *equivalen*, dimana hal ini menjadikan proses transformasi menjadi *the 'people'* memungkinkan (Laclau 2005). Kedua hal ini didasarkan pada bagaimana masyarakat yang semakin kompleks ini menjadi sebuah fenomena yang dinamakan *'logic of difference'* (Keucheyan 2015). Kompleksitas yang semakin meningkat juga relevan dengan tingginya tuntutan masyarakat kepada pihak yang berwenang dan berkuasa – yang mana sifat tuntutannya pun beragam. Dalam hal ini, tak semua tuntutan dapat ditampung – karena keragaman tersebut. Penolakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berkuasa ini yang menjadi landasan bagi masyarakat yang tuntutannya ditolak merasa memiliki nasib yang sama – yang mana hal ini dikonsepsikan sebagai sebuah antagonisme. Kesamaan “nasib penolakan” ini yang dinamakan sebagai *'logic of equivalence'*. Serangkaian peristiwa penolakan yang terjadi akhirnya mengantarkan pada sebuah konsep yang dinamakan *'chains of equivalence'* – yang mana homogenitas tuntutan sudah terjadi (Keucheyan 2015).

Menurut Laclau, hegemoni menjadi penting untuk mengantarkan *the 'people'* menjadi pihak yang menyuarakan segala macam tuntutan yang ada dalam pusaran *'chains of equivalence'* tanpa melibatkan antagonisme yang timbul ketika terjadi penolakan tuntutan. Terjadi semacam “pengaburan” tuntutan setelah adanya penolakan, dimana tuntutan menjadi bergeser hanya melihat antagonisme yang ada dan tidak lagi menyuarakan tuntutan awal. *The 'people'* menjadi pihak yang melakukan hegemoni untuk melakukan penyuaran tuntutan kepada pihak yang

dianggap “antagonis” tanpa melibatkan antagonisme – dengan kata lain: *the ‘people’* berbicara atas nama masyarakat.

Pendekatan populisme menurut Laclau banyak dikatakan sebagai pendekatan diskursif – yang mana hal ini tergambar dari konsep *the ‘people’*. *The ‘people’* bukanlah definisi dari masyarakat secara luas. Laclau mengonsepsikan *The ‘people’* sebagai sebuah konsep agensi baru dalam masyarakat yang memiliki latar belakang yang beragam (heterogen) (Laclau 2005: 224). Konsep *The ‘people’* sendiri memiliki prasyarat yaitu adanya *the plebs* di dalamnya. *The plebs* sendiri dapat dimaknai sebagai komunitas masyarakat yang terdiri dari latar belakang yang berbeda. Hadirnya *the plebs* dalam konsepsi *the ‘people’* menjadi penanda awal bahwa logika tersebut adalah logika populisme. Alasan bagaimana *the plebs* menjadi bagian dari *the ‘people’* adalah persamaan artikulasi yang dibentuk. Konsep *the ‘people’* ini juga yang membuktikan teori populisme milik Laclau menolak dikotomi masyarakat ke dalam kelas-kelas.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian

Penelitian dengan judul “*Local Gangster* dalam Dinamika Politik Lokal: Kebangkitan Bangsawan Lokal Bali dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca-Otoritarian” ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dinilai dapat meneliti lebih dalam mengenai perilaku sosial dan politik dari *local gangster* yang tidak dapat disimplifikasi secara kuantitatif. Adanya kompleksitas dalam penelitian ini – antara perilaku sosial-politik *local gangster*, praktek pemilihan kepala daerah, serta momen kebangkitan bangsawan adat Bali – tidak dapat direduksi ke dalam bentuk variabel-variabel tertentu untuk diteliti. Dengan kata lain, penelitian ini perlu dilakukan secara mendalam.

Adanya pendekatan kualitatif dalam penelitian ilmu politik sendiri sejatinya untuk melakukan analisa sikap dan perilaku politik yang tidak dapat dilihat secara kuantitatif saja (Harrison 2001: 74). Karakter penelitian dengan pendekatan

kualitatif ini cenderung lebih mendalam – bukan meluas. Hal ini dikarenakan pendekatan ini fokus mengeksplorasi dengan lebih terperinci (Harrison 2001: 74).

Penelitian dengan judul “*Local Gangster* dalam Dinamika Politik Lokal: Kebangkitan Bangsawan Lokal Bali dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca-Otoritarian” ini fokus membahas mengenai *local gangster* di Bali dan korelasinya dengan praktek demokrasi elektoral lokal. Praktek demokrasi elektoral pada penelitian ini pun difokuskan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Bali secara langsung yang berlangsung di era pasca-otoritarian. Dengan menentukan fokus tersebut, pencarian data hanya terfokus pada dinamika *local gangster* Bali dalam pusaran demokrasi elektoral di daerah serta pemaknaan kebangkitan bangsawan lokal pada periode-periode dimana Pemilihan Gubernur Bali dilakukan secara langsung – terhitung mulai 2008, 2013, hingga 2018.

Fokus dalam sebuah penelitian sendiri menjadi penting dalam menentukan spesifikasi penelitian hingga nantinya penelitian tidak melenceng pada hal yang sebenarnya tidak termasuk di dalam penelitian tersebut. Fokus penelitian ini juga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya – terlebih ketika mengumpulkan data.

Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa menetapkan fokus dalam setiap penelitian – terutama penelitian kualitatif – menjadi penting, yaitu: (1) fokus dapat membatasi studi, (2) fokus dapat membimbing peneliti untuk memilah mana data yang sekiranya perlu dikumpulkan dan mana yang tidak (Moleong dalam Suyanto dan Sutinah 2015: 22). Berbeda menurut pernyataan sebelumnya, menurut Neuman (2000 (dalam Suyanto dan Sutinah 2015)), membatasi ruang lingkup penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan: (1) pengalaman pribadi, (2) rasa keingintahuan dari sesuatu yang terdapat di media, (3) pengetahuan seseorang di lapangan, (4) penyelesaian suatu masalah, (5) penghargaan secara sosial, (6) nilai pribadi, dan (7) kehidupan sehari-hari.

1.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe eksplanatif. Penelitian eksplanatif sendiri merupakan salah satu tipe penelitian yang digunakan untuk menjelaskan mengapa problem yang diangkat dalam penelitian tersebut terjadi. Penelitian eksplanatif juga menandakan bahwa penelitian ini merupakan hasil dari pembacaan yang telah dilakukan penulis sebelumnya, yang nantinya dikonfirmasi di lapangan mengenai kedalaman alasan mengapa problem tersebut dapat terjadi – dengan kata lain penulis tidak datang dengan tangan kosong ketika di lapangan. Melalui penelitian eksplanatif, penulis menjelaskan problem yang terjadi melalui hasil yang didapat oleh penulis di lapangan maupun yang sudah dilakukan melalui pembacaan sebelumnya.

Berdampingan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe eksplanatif, penulis juga menggunakan aliran hermeneutik dalam penelitian ini dengan tujuan penulis memahami lebih dalam *local gangster* dalam konteks dan pemaknaan Bali – yang cenderung berbeda dengan *local gangster* yang berada di daerah lain. Hermeneutik sendiri dipahami sebagai sebuah aliran dalam keilmuan teologi, filsafat, serta kritik sastra (Oetomo dalam Suyanto dan Sutinah 2015: 182). Namun, aliran hermeneutik dapat pula digunakan dalam pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Oetomo (dalam Suyanto dan Sutinah 2015), penelitian hermeneutik memiliki argumentasi bahwa penulis hanya dapat menafsirkan makna dari suatu hal melalui suatu perspektif, pendirian, praktis, atau konteks situasi tertentu. Dengan juga menyertakan hermeneutik dalam tipe penelitian kualitatif yang penulis lakukan, penafsiran penulis terhadap eksistensi kelompok *local gangster* di Bali menjadi lebih kontekstual dan mendalam. Hal ini coba penulis maksimalkan ketika penulis berada di lapangan dan ikut di beberapa aktivitas *local gangster* bersama dengan kadernya.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Bali. Pemilihan Bali merupakan hasil analisa penulis terhadap penelitian serupa yang terbilang jarang mengangkat tentang Bali. Di Bali sendiri, penelitian mengenai *local gangster* belum terlalu banyak dilakukan oleh akademisi lokal. Selain itu, adanya ketertarikan penulis dengan karakteristik *local gangster* di Bali yang cenderung berbeda dengan daerah lain – karena nilai lokalitas Hindu-Bali yang diusung.

1.6.4 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* untuk menemukan informan. Hal ini sejalan dengan pendekatan kualitatif yang dipilih untuk penelitian ini. Mayoritas pendekatan kualitatif memiliki sampel pilihan yang cenderung sedikit dan sesuai dengan tujuan penelitian. Secara teknis, *snowball sampling* dilakukan dengan cara menemukan subjek penelitian yang telah disebutkan oleh informan sebelumnya (Vogt dalam Atkinson dan Flint 2001). *Snowball sampling* juga menawarkan hasil yang juga mendalam dengan kurun waktu yang lebih cepat (Atkinson dan Flint 2001).

Dalam konteks penelitian dengan topik *local gangster*, teknik *snowball sampling* menjadi logis karena cenderung sulit untuk menjangkau tokoh-tokoh yang ada dalam struktur *local gangster* tersebut. Penggunaan *snowball sampling* dalam penelitian ini juga memudahkan peneliti untuk dapat menjangkau informan yang “tersembunyi”.

Sesuai dengan pengalaman penulis di lapangan, penulis bertemu dengan seseorang bernama I Nyoman Gde Sudiantara – yang merupakan Dewan Pembina Baladika – pada Oktober 2017 yang mengantarkan penulis pada informan-informan lainnya seperti salah satu kader Baladika asal Kabupaten Tabanan (anonim), salah satu kader Laskar Bali yang merangkap sebagai kader Partai Golkar, serta beberapa pengurus desa adat (*pakraman*). Berdasarkan pengalaman penulis melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*), I Nyoman Gde Sudiantara dapat

diklasifikasikan sebagai informan kunci (*key informant*) – yang tak hanya memiliki banyak informasi yang dibutuhkan terkait penelitian ini, tetapi juga mengantarkan penulis kepada beberapa informan lainnya yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu proses yang terbilang penting dalam sebuah penelitian. Data dapat dimaknai sebagai kumpulan fakta dan hal ini yang menjadi penyokong valid atau tidaknya sebuah penelitian. Menurut sumbernya, data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: (1) data primer, dimana data diperoleh langsung dari objek atau subjek yang akan diteliti (responden atau informan), dan (2) data sekunder, dimana data diperoleh dari institusi tertentu yang berkaitan (Sudarso dalam Suyanto dan Sutinah 2015: 55-56).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua sumber data – baik data primer maupun data sekunder. Data primer dapat dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan informan terkait. Sedangkan untuk melakukan pengumpulan data sekunder sendiri diperoleh melalui kajian literatur, data-data dari institusi terkait – seperti Badan Pusat Statistik (BPS) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU); pun melalui publikasi penelitian terdahulu yang relevan.

Proses pengumpulan data penelitian ini penulis mulai pada akhir Oktober 2017. Proses ini diawali dengan pertemuan penulis dengan salah seorang aparat kepolisian yang sebelumnya sudah penulis kenal sebelumnya. Aparat kepolisian ini yang mengantarkan penulis *getting in* ke subjek penelitian utama, yaitu lingkungan *local gangster*. Sejak akhir Oktober hingga November 2017, penulis fokus untuk menggali informasi yang ada dalam lingkup *local gangster* di Bali bersama dengan I Nyoman Gde Sudiantara dan beberapa informan yang berhasil penulis temui dengan teknik *snowball sampling* – pasca bertemu dengan I Nyoman Gde Sudiantara.

I Nyoman Gde Sudiantara sendiri merupakan pihak yang banyak membantu penulis untuk memahami lebih dalam mengenai eksistensi *local gangster* di Bali. Dalam beberapa kesempatan, penulis bersama dengan I Nyoman Gde Sudiantara berkunjung ke beberapa lokasi yang menjadi pusat perkumpulan dari kedua *local gangster* yang penulis teliti – Laskar Bali dan Baladika. Penulis juga berkesempatan bertemu dengan beberapa kader Baladika ketika beberapa kali berkunjung ke kediaman I Nyoman Gde Sudiantara – dimana hal ini sangat membantu penulis untuk menggali beberapa informasi lebih dalam melalui perspektif kader di tingkat daerah. Pada saat Hari Raya Galungan dan Kuningan pun, penulis berkesempatan untuk mengikuti kegiatan sosial dari kader-kader Baladika dalam rangka merayakan hari raya umat Hindu-Bali. Dengan juga ikut serta dalam beberapa kegiatan dari *local gangster* bersama dengan elite *local gangster* itu sendiri, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis – melalui proses *getting in* – menjadikan penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian penuh. Hal ini dapat menghasilkan data yang cenderung lebih mendalam tentang *local gangster*.

1.6.6 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, analisa data juga harus dilakukan. Analisa data pada penelitian kualitatif perlu dilakukan karena kebanyakan data dalam penelitian kualitatif berupa rangkaian kalimat – dibandingkan dengan penelitian kuantitatif yang kebanyakan datanya bersifat numerik. Menurut Miles dan Huberman (1992), terdapat tiga alur analisa data kualitatif, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alur analisa tersebut untuk melakukan analisa data-datanya. Lebih spesifiknya, untuk melakukan analisa data, penulis menggunakan reduksi data.

Reduksi data dalam sebuah penelitian dilakukan untuk melakukan pemilihan, penyederhanaan, dan pentransformasian dari catatan yang terdapat di lapangan (Miles dan Huberman 1992). Hal ini dilakukan dengan tujuan mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan mengelompokkan data agar

dapat diverifikasi dan ditarik kesimpulan. Dalam melakukan proses ini, perlu dilakukan pengkajian data dari berbagai sumber sebagai permulaan. Setelah itu, perlu dibuat sebuah rangkuman khusus bagi masing-masing informan.